

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah haji adalah rukun Islam kelima. Kewajiban untuk berhaji minimal sekali dalam seumur hidup itu dibebankan hanya kepada seorang muslim yang mampu dalam arti luas, yaitu mampu secara jasmani maupun secara rohani. Ibadah haji juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang memenuhi syarat istitaah, baik secara finansial, fisik maupun mental.

Haji merupakan sebuah ritual ibadah istimewa yang tidak semua orang berkesempatan untuk melakukannya. Haji pada hakikatnya merupakan aktifitas suci yang pelaksanaannya diwajibkan oleh Allah kepada seluruh umat Islam yang telah mencapai istitho'a (mampu), disebut aktifitas suci karena seluruh rangkaian kegiatannya adalah ibadah. (Ali Syari'ati, Haji, 2000:1).

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia selalu menyelenggarakan haji setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, mengatur mengenai rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji yaitu untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jamaah haji. Adapun tujuan dari penyelenggaraan ibadah haji yaitu untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Penyelenggaraan Ibadah haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan,

profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan ibadah haji pasal 1 ayat 2 dan pasal 3).

Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia secara nasional menjadi wewenang Kementerian Agama (Kemenag). Dalam kewenangan tersebut juga terkandung tanggung jawab yang besar karena dalam pelaksanaan ibadah haji diperlukan pelayanan yang baik. Pelayanan ibadah haji tidak hanya menyangkut kesejahteraan lahir dan batin jamaah haji, namun menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Mengingat pelaksanaannya bersifat massal dan berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas, maka penyelenggaraan ibadah haji memerlukan manajemen yang baik, agar penyelenggaraan ibadah haji tersebut dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. (Dirjend. Pelayanan Haji dan Umroh, 2010:11).

Namun dalam prakteknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 belum menjawab harapan masyarakat karena masih terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan salah satunya terkait dengan kurangnya pembinaan melalui manasik haji yang hanya menitikberatkan pada ibadah hajinya saja tanpa memperhatikan aspek penguasaan lapangan. Dan juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 belum sepenuhnya dapat mempresentasikan terselenggaranya ibadah haji yang profesional sehingga penyelenggaraan ibadah haji menjadi permasalahan kompleks yang dihadapi pemerintah setiap tahunnya.

Sejauh ini yang peneliti dapatkan pada saat melakukan wawancara awal dengan pihak Kemenag Kota Sukabumi bahwa pengawasan mengenai pelaksanaan proses penyelenggaraan ibadah haji ini dinilai belum maksimal.

Berangkat dari permasalahan ini maka dibutuhkan pengawasan yang baik dan benar pada saat akan dilaksanakannya penyelenggaraan ibadah haji. Maka dari itu perlunya pimpinan yang bisa mengelola lembaga yang dinaunginya agar tingkat kedisiplinan pegawai lebih maksimal dalam memahami *jobdescnya* dan pimpinan juga perlu kiranya mengetahui lebih jauh bagaimana manajemen pelayanan ibadah haji, yang artinya sistem manajemen yang sejatinya dapat menjalankan fungsi-fungsi merencana, mengorganisasi, mengarahkan dan mengawasi kegiatan penyelenggaraan haji demi terlaksananya penyelenggaraan ibadah haji yang aman, lancar, dan berjalan dengan baik. (Pasal 5 Undang-Undang No 17 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji).

Penyelenggaraan ibadah haji akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan pengawasan yang baik agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam aktifitas penyelenggaraan ibadah haji, pengawasan sangatlah dibutuhkan. Pengawasan mempunyai kedudukan penting dalam suatu lembaga. Tanpa pengawasan yang baik kegiatan-kegiatan suatu lembaga yang dilaksanakan tidak dapat dicapai tujuannya. Jadi, secara teoritis keberhasilan suatu lembaga terletak pada kemampuan pimpinan lembaga beserta staf pengurus lembaga lainnya yang secara operasional melakukan pengelolaan terhadap organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Setiap lembaga pasti memerlukan pegawai sebagai tenaga yang menjalankan setiap aktivitas yang ada dalam lembaga tersebut. Seorang pegawai merupakan aset terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap kesuksesan sebuah lembaga atau kesuksesan sebuah kegiatan. Tanpa mesin canggih, lembaga dapat

terus beroperasi secara manual, akan tetapi tanpa pegawai, lembaga tidak akan dapat berjalan sama sekali. Maka dari itu pada saat penyelenggaraan ibadah haji lembaga membutuhkan pegawai yang dapat membantu mencapai tujuan dan membutuhkan pegawai yang dapat mengerti tentang proses penyelenggaraan ibadah haji serta dapat memahami setiap aspek yang dibutuhkan oleh jamaah haji agar jamaah haji tidak tersesat karena tidak memahami alur perjalanan ibadah haji pada saat praktik dilapangan.

Berdasarkan data diatas, kita dapat melihat bahwa dalam penyelenggaraan ibadah haji dibutuhkan persiapan yang matang dan dibantu dengan manajemen yang baik yang dilakukan oleh setiap unsur manajemen (men/manusia) baik itu pemimpin maupun pegawai agar tidak terjadi lagi permasalahan yang begitu kompleks pada saat eksekusi dilapangan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“POLA PENGAWASAN KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI (Studi Deskriptif pada Kementrian Agama Kota Sukabumi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam pembuatan skripsi ini adalah permasalahan sekitar Pola Pengawasan Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai. Selanjutnya untuk mempermudah pembahasan dan analisis pokok pembahasan tersebut, maka penulis merincikan dengan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa saja standar pengawasan yang ditetapkan di Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Sukabumi?
2. Bagaimana tindakan evaluasi yang dilakukan Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Sukabumi?
3. Bagaimana tindakan perbaikan (*corrective*) yang dilakukan Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja standar pengawasan yang ditetapkan di Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Sukabumi.
2. Untuk mengetahui tindakan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Sukabumi
3. Untuk mengetahui tindakan perbaikan (*corrective*) yang dilakukan oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Sukabumi

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai media pembelajaran metode penelitian pola pengawasan sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi Fakultas Dakwah dan Komunikasi mengenai pola manajerial penyelenggaraan ibadah haji di Kota Sukabumi;
- c. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan dapat memperkaya khasanah perkembangan ilmu manajemen khususnya tentang pola pengawasan dalam meningkatkan kinerja karyawan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru bagi peneliti melalui pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang penyelenggaraan ibadah haji dan memberikan pengalaman pembelajaran bagi peneliti agar dapat lebih dalam mengkaji mengenai penyelenggaraan ibadah haji serta dijadikan sebagai penerapan teori yang diperoleh di bangku kuliah.

b. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah Indonesia khususnya dalam pengaruh pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan peningkatan kinerja karyawan pada saat penyelenggaraan ibadah haji.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penulisan dan plagiatisme, maka penulis sampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang telah disusun oleh Wildan Nurul Muttakin (2016) dengan judul “Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Bandung”. Skripsi ini menjelaskan bahwa tujuan peneliti yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan Bidang Pendidikan Madrasah terhadap kinerja karyawannya di dalam pelaksanaan program kerja serta tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja para karyawannya.

Kedua, skripsi yang telah disusun oleh Usup Supriatna (2016) dengan judul “Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Kerja Pegawai”. Skripsi ini menjelaskan bahwa tujuan peneliti yaitu untuk mengetahui realitas peranan pemimpin dalam meningkatkan fungsi pengawasannya terhadap pegawai di Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Bandung. Selain itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk serta tahapan-tahapan yang diterapkan pemimpin dalam hal pengawasan disiplin kerja pegawai.

Ketiga, skripsi yang telah disusun oleh Mia Sumiyati (2012) dengan judul “Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Pada KBIH Al-Maghfirah”. Skripsi ini menjelaskan bahwa tujuan peneliti yaitu untuk mengetahui fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan ibadah haji, baik dari segi penetapan standar, penilaian (evaluasi), tindakan perbaikan dalam penyelenggaraan ibadah haji pada KBIH Al-Maghfirah.

F. Kerangka Pemikiran

Haji adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan mengunjungi *Ka'bah* dan dilakukan pada waktu tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan atau

ditetapkan. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka menaati perintah Allah SWT., dan mencapai rida-Nya. Ibadah haji tidak dilakukan di sembarang tempat, waktu, dan perbuatan. Jika tidak dilakukan pada tempat, waktu, dan tidak memnuhi ketentuannya, bukanlah haji.

Kegiatan inti ibadah haji dimulai pada tanggal 8 dzulhijjah ketika umat islam bermalam di mina, wukuf (berdiam diri) dipadang arafah pada tanggal 9 dzulhijjah, dan berakhir setelah melempar jumrah (melempar batu simbolisasi setan) pada tanggal 10 dzulhijjah, masyarakat Indonesia biasa menyebut juga hari raya idul adha sebagai hari raya haji karena bersamaan dengan perayaan ibadah haji ini.

Hakikat penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji. (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Pasal 1). Pembinaan ibadah haji adalah rangkaian yang mencakup penerangan, penyuluhan, dan pembimbingan tentang ibadah haji. Pelayanan meliputi seluruh aktivitas untuk memberikan layanan kepada calon jemaah haji dan jemaah haji, mulai dari saat pendaftaran hingga kembali lagi ke Tanah Air, termasuk pelayanan transportasi, akomodasi, serta kesehatan.

Sementara itu, menurut Stoner manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan oleh para anggota organisasi, serta penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (Handoko, 2003: 8).

Manajemen juga memiliki beberapa fungsi, menurut G.R. Terry, fungsi-fungsi manajemen adalah *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Ini adalah

prosedur dalam membuat atau merealisasikan sebuah pelaksanaan dalam suatu lembaga atau organisasi. Bagian dari organisasi yang bertugas untuk meneliti, memeriksa pelaksanaan adalah pengawasan.

Teori pengawasan menurut Prajudi Atosudirjo yang dikutip oleh Hamzah Yaqub (1984:110) mengatakan bahwa pengawasan itu terjadi atas segala aktifitas dan tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan yang telah dibuat dan sedang dilakukan atau dengan kata lain, pengawasan adalah keseluruhan daripada aktifitas dan tindakan-tindakan (measures and metrelegen) kita untuk menjamin atau membuat supaya semua pelaksanaan berlangsung serta berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan, diputuskan dan diakomodasikan”

Proses pengendalian dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah berikut (Hasibuan, 2009:245) :

1. Menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar pengendalian.
2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai.
3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada.
4. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

Rencana juga perlu dinilai ulang dan dianalisis kembali, apakah sudah benar-benar realistis atau tidak. Jika belum benar atau realistis maka rencana itu harus diperbaiki.

Seorang manajer harus mempunyai berbagai cara untuk memastikan bahwa semua fungsi manajemen dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat diketahui

melalui proses *controlling* atau pengawasan. Cara-cara pengendalian atau pengawasan ini dilakukan sebagai berikut :

1. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh manajer. Manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasil-hasilnya sesuai dengan yang dikehendakinya.

2. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Laporan ini dapat berupa lisan atau tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai.

3. Pengawasan berdasarkan kekecualian

Pengawasan berdasarkan kekecualian adalah pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Pengendalian semacam ini dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung oleh manajer.

Dalam menerapkan fungsi pengawasan, pimpinan memegang peranan yang sangat penting karena pimpinan merupakan pemeran utama dan pemegang kendali sebuah organisasi, seorang pemimpin yang melaksanakan pengawasan disebut pengawas karena tugasnya mengawasi dan bertanggungjawab atas berlangsungnya sebuah program. Seperti pendapat Moekijat (1990:9) “pengawas” adalah seseorang dalam suatu organisasi yang bertanggungjawab atas pekerjaan oranglain.

Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan (organisasi), karyawan, dan masyarakat. Dengan manajemen, daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen dapat ditingkatkan. Unsur-unsur manajemen terdiri dari atas: *man, money, method, machines, materials*, dan *market*, disingkat 6 M. (Hasibuan, 2007, 1).

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan. Usaha yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan perusahaan salah satunya mempunyai karyawan yang memiliki kinerja yang baik. Kinerja merupakan hasil pencapaian kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2011:67).

Kinerja berasal dari kata *job performance* dan disebut juga *actual performance* atau prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seorang karyawan. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Kinerja merupakan suatu konstruk sehingga banyak ahli yang masih memiliki sudut pandang berbeda dalam mendefinisikan kinerja tersebut.

Menurut Moehariano (2010: 106-107) kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu dan sekelompok karyawan mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang telah ditetapkan organisasi.

Menurut John Whitmore yang dikutip oleh Lilis Sulastri (2016:162) mengatakan bahwa kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan”.

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negative dari suatu kebijakan operasional.

Kinerja merefleksikan seberapa baik karyawan untuk memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan. Kinerja yang baik adalah kinerja yang mengikuti tata cara atau prosedur sesuai standar yang telah ditetapkan. Akan tetapi didalam kinerja tersebut harus memiliki beberapa kriteria agar meningkatkan produktifitas sehingga apa yang diharapkan bisa berjalan sesuai dengan apa yang di inginkan.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kementrian Agama Kota Sukabumi Bidang Haji dan Umroh yang beralamat di Jl. Taman Bahagia No. 20, Benteng, Warudoyong, Kota Sukabumi-43132 Provinsi Jawa Barat, pengambilan lokasi di daerah tersebut mengingat besarnya kemungkinan penelitian dapat dilaksanakan yaitu dengan melihat data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tersedia dan untuk mengumpulkan data-data juga tidak terlalu sulit.

Dilihat dari pertimbangan kesesuaian dengan latar belakang akademik penyusun, penelitian ini tepat dilaksanakan mengingat ada kolerasi antara penyusum yang sedang studi tentang manajemen dakwah dengan pengambilan judul dan objek penelitian tersebut.

Dilihat dari pertimbangan geografis, mudah dijangkau karena tempat tinggal penyusun tidak jauh dari lokasi penelitian sehingga dalam penelitian ini tidak memerlukan sarana dan prasarana yang lebih banyak.

2. Metodologi Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan dasar untuk meningkatkan pengetahuan. Kegiatan penelitian bersifat: 1) sistematis, artinya dilaksanakan menurut pola tertentu, dari yang paling sederhana sampai kompleks hingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien; 2) berencana, artinya dilaksanakan dengan adanya unsur kesengajaan dan sebelumnya sudah dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya; dan 3) mengikuti konsep ilmiah, artinya mulai awal sampai akhir kegiatan penelitian mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. (Suharsimi, 1998:14).

Metode deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Metode ini bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Dalam proses pengumpulan datanya ia lebih menitikberatkan pada observasi lapangan dan suasana ilmiah, dengan mengamati gejala-gejala, mencatat, mengategorikan, dan sedapat mungkin menghindari pengaruh kehadirannya untuk menjaga keaslian gejala yang diamati. (Jalaludin Rakhmat, 1985: 34-35).

3. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis sumber data dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Data Primer

Dalam penelitian ini yang masuk ke dalam data primer adalah data yang berkaitan dengan pola pengawasan kepala seksi penyelenggaraan haji dan umrah dalam meningkatkan kinerja pegawai di Kementerian Agama kota Sukabumi. Oleh karena sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh dan Staf Bidang Haji dan Umroh.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan penunjang dan pelengkap dalam melakukan suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung atau data tidak asli. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah teori-teori yang berhubungan dengan pola pengawasan kepala seksi penyelenggaraan haji dan umrah, catatan-catatan haji dan hasil-hasil rapat.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan pengamatan terhadap objek penelitian secara langsung. Teknik ini digunakan untuk mempermudah serta mengetahui keadaan atau kondisi objek penelitian yang sebenarnya, selain itu hal yang paling penting dalam observasi ini adalah untuk mengamati pola pengawasan kepala seksi penyelenggaraan haji dan umrah dalam meningkatkan kinerja pegawai di Kementerian Agama Kota Sukabumi.

b. Wawancara

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama metode observasi (pengamatan). Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan, langsung bertatap muka antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai (Wardi Bahtiar, 1999:72).

Dalam pelaksanaan pengumpulan data lapangan, penelitian sosial dapat menggunakan metode wawancara mendalam. Sesuai dengan pengertiannya, wawancara mendalam bersifat terbuka. Pelaksanaan wawancara tidak hanya sekali atau dua kali, melainkan berulang-ulang dengan intensitas yang tinggi.

Jenis wawancara yang akan penulis gunakan adalah jenis semi struktural. Wawancara semi struktural adalah wawancara yang daftar pertanyaannya dapat dikembangkan dan tidak hanya terpaku pada daftar pertanyaan yang dibawa oleh penulis. Dengan adanya fleksibilitas dalam bertanya akan memudahkan penulis untuk mengembangkan pertanyaan (Arikunto, 1998: 145).

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 1998:236).

Untuk memperoleh data dan informasi sekitar masalah yang dikaji, adalah dengan cara menelaah dokumen-dokumen berupa berkas-berkas laporan

penyelenggaraan ibadah haji. Dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data-data yang lengkap, objektif, dan akurat sesuai dengan tujuan penelitian.

d. Studi Kepustakaan

Setiap penelitian membutuhkan bahan dan konsep yang diperoleh melalui kepustakaan, untuk mengumpulkan data teoritis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari literatur-literatur, bahan kuliah, dan hasil penelitian lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai masalah yang sedang dibahas.

5. Teknik Analisis Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data (Moleong, 2002:103).

Dalam analisis data ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah:

- a. Mengumpulkan data-data tentang kondisi objektif, doumen-dokumen dan hasil wawancara mengenai pola pengawasan kepala seksi penyelenggaraan haji dan umrah dalam meningkatkan kinerja pegawai di Kemenag Kota Sukabumi.
- b. Mengklarifikasi data-data tersebut sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

- c. Menyimpulkan data-data sesuai dengan tujuan penelitian yang dirumuskan, yaitu mengetahui pola pengawasan kepala seksi penyelenggaraan haji dan umrah dalam meningkatkan kinerja pegawai di Kemenag Kota Sukabumi.

